DAFTAR PUSTAKA

1. *Undang-undang Dasar 1945*, Pustaka Amani, Jakarta.
2. *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 1995*, Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak.
3. *Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (KUP, PPh, PPN) Tahun 1995,* Citra Umbara, Bandung.
4. *Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Tahun 1995*, PT Indah Karya (Persero), Bandung.
5. Chidir Ali, SH., Pengantar Rochmat Soemitro, Prof., Dr., SH., *Hukum Pajak Elementer,*_____.
6. Ashari A. Samudra, Drs., Msi., *Perpajakan di Indonesia,*_____.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
LPKIG

KEPUTUSAN DIREKSI PERSERO P.T. INDAH KARYA

NOMOR : P.6/5/5/'88

T E N T A N G :

"REORGANISASI SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PERSERO P.T. INDAH KARYA"

DIREKSI PERSERO P.T. INDAH KARYA :

MENIMBANG :

1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Direksi Persero P.T. Indah Karya untuk periode tahun 1988-1993 maka dipandang perlu untuk menyusun/menata kembali susunan organisasinya yang sejalan dengan perkembangan Perusahaan dengan harapan dapat membantu kelancaran tugas-tugas yang dihadapinya ;

2. Bahwa setelah diadakan konsolidasi sesuai dengan perkembangan Perusahaan saat ini dalam usaha meningkatkan prestasinya, memperkuat untuk diadakan penataan tersebut ;

3. Bahwa untuk tertibnya perlu mengaturnya dalam surat keputusan ini ;

MENGINGAT :

1. P.P. No.66 th. 1971 ;
2. Akte Notaris Djojomoeljadi SH No.106 th.1972 ;
3. Akte Notaris Imas Fatimah SH No. 8 th.1982 tentang Perubahan Anggaran Dasar ;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 345/KMK.013/1988 tgl. 29-2-1988 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Mengakhiri berlakunya surat keputusan Direksi Persero P.T. Indah Karya No. P.6/1/13/85 tgl 29 April 1985 dan kepada para pejabat sebelumnya disampaikan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Perusahaan selama yang bersangkutan memangku jabatannya ;

KEDUA :

Susunan organisasi Persero P.T. Indah Karya yang terdiri dari :

1. UNSUR PEMBINAAN
   1.1. Direktorat Pembinaan Badan Usaha Negara Departemen Keuangan ;
   1.2. Biro Bina Sarana Perusahaan Departemen Pekerjaan Umum ;

2. UNSUR PENGAWASAN
   Dewan Komisaris ;

3. UNSUR PIMPINAN
   Direksi terdiri dari :
   3.1. Direktur Utama
   3.2. Direktur Sipil Basah
   3.3. Direktur Sipil Kering
   3.4. Direktur Administrasi & Keuangan

4. UNSUR PEMBANTU (ADMINISTRASI)
   4.1. Satuan Pengawasan Intern
   4.2. Pusat Penelitian & Pengembangan
   4.3. Bidang Administrasi & Keuangan
      4.3.1. Bagian Kepegawaian
      4.3.2. Bagian Keuangan
      4.3.3. Bagian Umum
      4.3.4. Bagian Akuntansi

5. UNSUR PELAKSANA (TEKNIK)
   5.1. Bidang Sipil Basah
   5.2. Bidang Sipil Kering
   5.3. Bidang Teknik Penyehatan/Andal
   5.4. Bidang Planologi
   5.5. Bidang Arsitektur
   5.6. Bidang Teknik Industri & Sistem Manajemen
   5.7. Unsur Pelengkap
      5.7.1. Survai dan Pengukuran
      5.7.2. Studio dan Penggambaran
      5.7.3. Komputer
      5.7.4. Laboratorium

6. UNSUR PELAKSANA DI DAERAH

6.1. Cabang-cabang

6.1.1. Jakarta
6.1.2. Semarang
6.1.3. Surabaya
6.1.4. Bandarlampung
6.1.5. Medan

6.2. Perwakilan-perwakilan

6.2.1. Yogyakarta
6.2.2. Denpasar
6.2.3. Padang
6.2.4. Pekanbaru
6.2.5. Samarinda
6.2.6. Ujung Pandang
6.2.7. Banda Aceh

7. UNIT KERJA EKSTRA STRUKTURAL

Pengelolaan peralatan pengukuran, pemetaan dan komputer milik Direktorat Bina Program Pengairan ;

KETIGA :

Struktur Organisasi begitu pula susunan Personalia dan Uraian Tugas masing-masing diatur dalam lampiran I, IIA, IIB dan III surat keputusan ini ;

KEEMPAT :

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal : 15 Agustus 1988

dengan ketentuan,

apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Badan Usaha Negara Ditjen. Moneter Departemen Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Biro Bina Sarana Perusahaan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta ;

3. Dewan Komisaris Persero P.T. Indah Karya di Jakarta ;
4. Satuan Pengawasan Intern Persero P.T. Indah Karya di Bandung ;
5. Kepala Cabang Persero P.T. Indah Karya di Jakarta, Semarang, Surabaya, Teluk Betung dan Medan ;
6. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Persero P.T. Indah Karya di Bandung ;
7. Kepala-kepala Bidang dan Kepala-kepala Bagian dalam lingkungan Persero P.T. Indah Karya di Bandung ;
8. Kepala-kepala Perwakilan Persero P.T. Indah Karya di Yogyakarta, Denpasar, Padang, Pekanbaru, Samarinda, Ujung Pandang dan Banda Aceh ;
9. Masing-masing yang bersangkutan ;
10. A r s i p .-

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 13 - 8 - 1988

PERSERO P.T. INDAH KARYA,

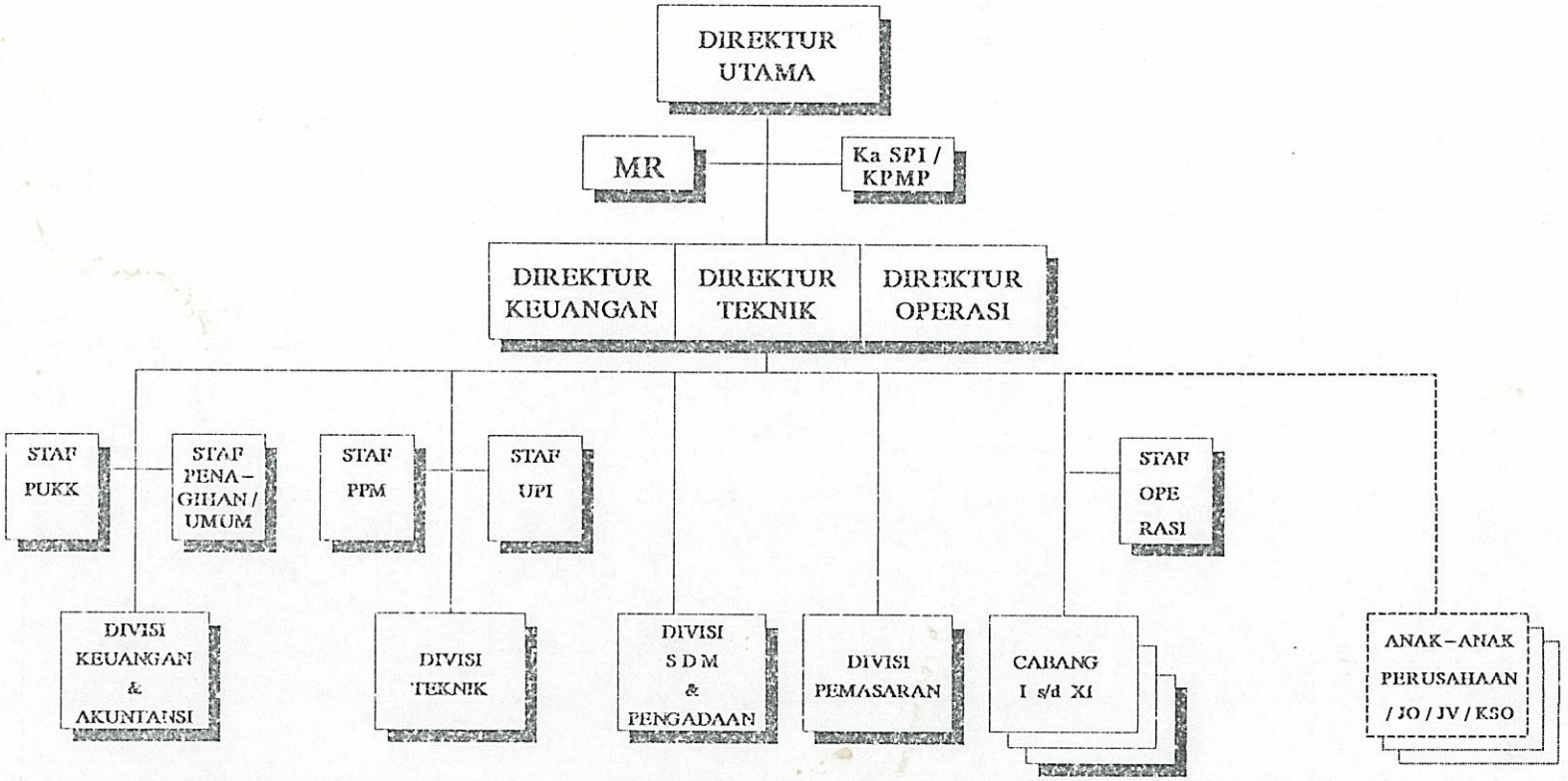
PT INDAH KARYA
Konsultan Perencana
BANDUNG

Ir. M U D Y O N O

Direktur Utama

Lampiran I
Surat Keputusan Direksi
Nomor : 06/SK/DIR/X/95
Tanggal 16 Oktober 1995

STRUKTUR ORGANISASI
PT INDAH KARYA (PERSERO)



B:\ORG96.WK1



SHARE HOLDERS, COMMISSIONERS, DIRECTORS AND STAFF

SHARE HOLDERS	:	- MINISTRY OF FINANCE
		- MINISTRY OF PUBLIC WORKS
CHIEF OF COMMISSARY BOARD	:	Ir. TUBAGUS HAEDER ALI
MEMBER OF COMMISSARY BOARD	:	Ir. J.P. HENDRO PRANOTO SUSILO M.P.W
	:	Drs. SOEHARNO
PRESIDENT DIRECTOR	:	Ir. MUDYONO
DIRECTOR I	:	Ir. SOEKADARJANTO Dipl, HE.
DIRECTOR II	:	Ir. SOEHARDONO
DIRECTOR OF ADMINISTRATION & FINANCE	:	Drs. H. ADRIAN MOEDJENAN
RANCH OFFICE MANAGER OF JAKARTA	:	Ir. NIRBOYO SASONO
RANCH OFFICE MANAGER OF SEMARANG	:	Ir. SOEKADARJANTO Dipl.HE.
RANCH OFFICE MANAGER OF SURABAYA	:	Ir. SOEMANTORO GUNAWAN
RANCH OFFICE MANAGER OF MEDAN	:	Ir. JIMMY SARDJONO MICHAEL
RANCH OFFICE MANAGER OF BANDAR LAMPUNG	:	Ir. T. MARULY NADAPDAP
RANCH OFFICE MANAGER OF PALEMBANG	:	Ir. SIAGIAN
EPRESENTATION OFFICE MANAGER OF SAMARINDA	:	Ir. SOEHARDONO
EPRESENTATION OFFICE MANAGER OF YOGYAKARTA	:	MARDIONO BE.
EPRESENTATION OFFICE MANAGER OF DENPASAR	:	Ir. KUKUH OPERASIADI
EPRESENTATION OFFICE MANAGER OF UJUNG PANDANG	:	Ir. SUKARMAN
EPRESENTATION OFFICE MANAGER OF PEKANBARU	:	Ir. SUBUR GINTING
EPRESENTATION OFFICE MANAGER OF BANDA ACEH	:	Ir. DARWIN MANSYUR
EPRESENTATION OFFICE MANAGER OF PADANG	:	Ir. T. MARULY NADAPDAP
HIEF OF FINANCE & ACCOUNTING DIVISION	:	Drs. NARDI HENDARTO
HIEF OF ADMINISTRATION & GENERAL AFFAIRS DIVISION	:	Drs. NARDI HENDARTO
HIEF OF WATER RESOURCES DIVISION	:	Ir. SUDJARWO
HIEF OF SANITARY & ENVIRONMENTAL DIVISION	:	Ir. H. PAMEKAS M.Eng.
HIEF OF REGIONAL & CITY PLANNING DIVISION	:	Ir. INEKE SETIABUDIWATI
HIEF OF AGRICULTURE & FISHERY DIVISION	:	Ir. SOEKADARJANTO Dipl.HE.
HIEF OF ROAD & BRIDGES DIVISION	:	MANUEL NARAY BRE
HIEF OF TRANSPORTATION DIVISION	:	Ir. SOEHARDONO
HIEF OF ARCHITECTURAL DIVISION	:	Ir. SOEHARDONO
HIEF OF INDUSTRIAL & MANAGEMENT DIVISION	:	Ir. SOEHARDONO
HIEF OF INTERNAL AUDIT DIVISION	:	SUDIYANTO Bsc.
HIEF OF RESEARCH & DEVELOPMENT DIVISION	:	Ir. SAKLI ANGGORO
HIEF OF FINANCE SECTION	:	MANSYUR RUSMANA Bsc.
HIEF OF ACCOUNTING SECTION	:	ECIH SUHAMDAN Bsc.
HIEF OF PERSONNEL SECTION	:	MAMAT RUCHIMAT Bsc.
HIEF OF GENERAL AFFAIRS SECTION	:	SODIKIN

DAFTAR PERHITUNGAN PPH PASAL 21

MASA BULAN : J U N I 1996

No	Nama lengkap	TK/K	Penghasilan Bruto	Potongan		Penghasilan Neto	P T K P	Penghasilan Kena Pajak	PPH Pasal 21	Keterangan
				Bi Jabatan	Pensiun					
V	PBT NON TEKNIK									
66	Achmad Junus	K3	668.770	33.438	31.277	604.055	432.000	172.055	17.200	
67	Barbara	K3	389.560	19.478	16.113	353.969	432.000	0	0	
68	Djawahir	K3	379.805	18.990	16.407	344.408	432.000	0	0	
69	Etti Rochaety, Nyonya	K	378.805	18.940	19.266	340.599	216.000	124.599	12.458	
70	Hadi Purnomo	K3	470.255	23.512	25.759	420.984	432.000	0	0	
71	Indah Widowati	TK	366.304	18.315	20.645	327.344	144.000	183.344	18.333	
72	Iskandar Zulkarnain	K3	349.903	17.495	24.137	308.271	432.000	0	0	
73	Mika Heryanto	K2	484.214	24.210	25.295	434.709	360.000	74.709	7.467	
74	Saparudin	K3	485.099	24.254	22.916	437.929	432.000	5.929	592	
75	Sukimo	K3	363.686	18.184	18.493	327.009	432.000	0	0	
76	Sukiyo	K3	553.690	27.684	20.367	505.639	432.000	73.639	7.358	
77	Suwarno	K2	467.422	23.371	19.938	424.113	360.000	64.113	6.408	
78	Usep Suherman	K3	361.724	18.086	18.008	325.630	432.000	0	0	
79	Wahyu bin Deme	K3	347.577	17.378	21.104	309.095	432.000	0	0	
80	Yana Sumaryana	K3	396.355	19.817	23.737	352.801	432.000	0	0	
81	Yasprono	TK	346.981	17.349	14.497	315.135	144.000	171.135	17.108	
82	Yousef Normal Fasya	K3	442.526	22.126	24.285	396.115	432.000	0	0	
83	Yuningsih, Nyonya	TK2	397.457	19.872	19.024	358.561	288.000	70.561	7.050	
84	Yanti Arni H	TK	347.577	17.378	23.206	306.993	144.000	162.993	16.292	
	Sub Total PBT Non Teknik :		7.997.710	399.877	404.474	7.193.359	6.840.000	1.103.077	110.267	

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
WILAYAH CIBEUNYING

S.S.P.
(SURAT SETORAN PAJAK)

LEMBAR 1
Untuk
WAJIB PAJAK/PKP
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN

A. 1. NAMA WP : PT Indah Karya (Persero)
2. Alamat : Jl Ir. H Juanda No. 63, Bdg 40116

B. NPWP : 1 0 0 0 0 1 2 3 4 2 3
C. KODE CABANG :
D. KODE KLU : 8 2 9 4 0

E. JENIS PAJAK : PPh pasal 21 (Karyawan)
KODE JENIS PAJAK (MAP) : 0 1 1 1

F. JUMLAH SETORAN : Rp. 8.456.150,00

DENGAN HURUF : Delapan juta empat ratus lima puluh enam-- ribu seratus lima puluh rupiah=====

JENIS SETORAN (Pilih dan isi salah satu nomor di bawah ini)

1. SPT Masa atau Pembetulannya : Bulan April 19 96
2. SPT Tahunan (PPh Ps 29/21) atau Pembetulannya : Tahun 19 .....
3. STP No. : Masa ..... 19 .....
4. SKP/SKPKB No. : Masa/Tahun *) .....
5. SKPT/SKPKBT No. : Masa/Tahun *) .....
6. PPN/PPnBM yang disetor oleh Pemungut PPN/PPnBM : Masa ..... 19 .....
7. FISKAL LUAR NEGERI : a. Nomor Paspor : .....
   b. Penerbangan/Pelayaran *) : No. ..... Tgl. ..... 19 .....
   c. Ditanggung oleh : Pribadi/Dinas/Perusahaan *)
8. .....

PERHATIAN

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSP pada halaman belakang lembar ini.

Bandung TGL. 10 Mei 1996
WAJIB/ PENYETOR

Achmad Junus

DITERIMA OLEH :
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal 10 - 05 - 1996.
BANK NIAGA
Tanda Tangan :
Nama Terang : ENTIEN KARTINI
Sub. Manager

DITERIMA OLEH KPP.
Tanggal dan Paraf
1996

KP. PDIP. 5.1 - 95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak :.....

N P W P :.....

Alamat :.....

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Honorarium	: Rp.....		.....	Rp.....
2. Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian.	: Rp.....		.....	Rp .....
3. Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli.	: Rp.....	.....	.....	Rp .....
4. Penarikan Iuran Dana pada Dana Pensiun.	: Rp.....		.....	Rp .....
5. Imbaian Lainnya.	: Rp.....	.....	.....	Rp .....
			JUMLAH	Rp. .....

....., ... 19.....

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Harap diisi dengan : **benar dan lengkap**, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Pemotong Pajak :

N a m a :.....

N P W P :.....

Alamat :.....

.....

Tanda tangan dan cap

.....

KP.PPh.2.1/BP-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Karyawan dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan April tahun 1996 adalah sebesar
Rp. 11.403.050,00
(Sebelas juta empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 21 yang dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	Pajak yang dipotong
1. Pegawai Tetap	101 orang	Rp. 97.289.879,00	Rp. 8.456.150,00
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	–	Rp. –	Rp. –
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran Berkala lainnya	–	Rp. –	Rp. –
4. Pegawai Harian / Mingguan	–	Rp. –	Rp. –
5. Pegawai Satuan	–	Rp. –	Rp. –
6. Pegawai Borongan	–	Rp. –	Rp. –
7. Pegawai Honorer	–	Rp. –	Rp. –
8. Penerima Honorarium	2 orang	Rp. 9.064.000,00	Rp. 544.000,00
9. Penarikan Iuaran Dana pada Dana Pensiun	–	Rp. –	Rp. –
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	–	Rp. –	Rp. –
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	–	Rp. –	Rp. –
	Jumlah	Rp. 106.353.879,00	Rp. 9.000-150,00

Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya ..... Rp. – *)

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Karyawan dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang harus disetor/ kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan ..... Rp. – **)

KP. PPh.1.1/SPT-95

B. PPh. Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	Pajak yang dipotong
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan	4 orang	Rp. 42.652.779,00	Rp. 2.402.900,00
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	–	Rp. –	Rp. –
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/ Daerah	–	Rp. –	Rp. –
Jumlah		Rp. 42.652.779,00	Rp. 2.402.900,00

C. Lampiran :

1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP Pasal 21/26).
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas penghasilan dari Pegawai Honorer.
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak 4 (Empat) lembar.

D. Pernyataan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa peberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

UNTUK DINAS : 13 MAY 1996

Diterima tanggal, ..., 19 .....

Petugas,

Tanda tangan dan cap

NIP.

Banding, 13 Mei 1996

Pemotong Pajak,

Nama : PT Indah Karya (Persero)
N P W P : 1.000.012.3-423
Alamat : Jl Ir.H Juanda No. 63, Bdg 40

Tanda tangan dan cap

Achmad Junus

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

**) Coret yang tidak perlu.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

(LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NO. KEP.- 08/PJ.11/1995 TANGGAL : 5 OKTOBER 1995)

FORMULIR 1721

TAHUN TAKWIM 1995

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN .....
2. STATUS SPT ☐
3. N/K/L (F.7) ☐
4. LAMPIRAN ☐

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 | 0 0 0 | 0 1 2 | 3 | 4 2 3

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT Indah Karya (Persero)

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jalan Ir. H Juanda No. 63
KOTA/KODE POS : Bandung 4 0 1 1 6
TELEPON : 433552

D. JENIS USAHA : Jasa Konsultan Tennik
KODE KLU : | | | | |

E. NAMA PIMPINAN : Drs. Adrian Moedjenan

F. DALAM TAHUN TAKWIM 1995 TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

	GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	157 Orang	1.232.829.608,00	148.149.462,00
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	2 Orang	54.384.000,00	3.264.000,00
3.	JUMLAH (1 + 2)	159 Orang	1.287.213.608,00	151.413.462,00
4.	PPh PASAL 21/26 YANG TELAH DISETOR			145.255.322,00
5.	STP PPh PASAL 21/26 (HANYA POKOK PAJAK)			-
6.	JUMLAH (4 + 5)			145.255.322,00
7.	a. ☒ PPh PASAL 21/26 YANG MASIH HARUS DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			6.158.140,00
	b. ☐ PPh PASAL 21/26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			

• JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .. Maret 1995

G. PERMOHONAN

PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN .....TAHUN .....

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. ☒ SURAT SETORAN PAJAK
2. ☐ SURAT KUASA KHUSUS
3. ☐ LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4. ☐ PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
5. .....
6. .....

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA :

(a) APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT;
(b) TIDAK MEMBAYAR PENGHASILAN LAIN SELAIN DARIPADA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS.

Bandung, TGL 22 Maret 19 96

• ☒ PEMOTONG PAJAK • TANDA TANGAN

☐ KUASA NAMA TERANG

Drs. Adrian Moedjenan
Direktur Keuangan

KD DDH 3.2.95

LAMPIRAN I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/ TABUNGAN HARI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM 1995

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Indah Karya (Persero)

NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 | 0 0 0 | 0 1 2 | 3 | 4 2 3

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELAMPAUI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hendro Pranoto Suselo, Ir	5.257.540.4.022	30.420,000,00	3.313.000,00
2	Tubagus Haedar Ali, Ir	-	28.840.000,00	3.076.000,00
3	Kartomo Wirjobroto, Drs	5.048.636.4.027	27.780.000,00	2.917.000,00
4	ST Maryono, Drs	-	8.888.000,00	888.800,00
5	Soeharto, Ir	5.117.845.7.016	127.802.808,00	28.102.000,00
6	Soekadarjanto, Ir	5.142.965.2.423	118.388.679,00	25.016.800,00
7	Samuel Bambang Sutejo, Ir	5.481.062.7.011	91.897.879,00	17.355.700,00
8	Adrian Moedjenan, Drs	5.410.340.3.424	118.388.679,00	25.016.800,00
9	R. Pamekas, Ir	5.262.971.8.029	26.270.112,00	2.195.933,00
10	Parijan Notowijoyo, Ir, MSc	-	33.505.178,00	3.049.300,00
11	Soemantoro Goenawan, Ir	5.300.828.0.046	30.922.862,00	2.573.950,00
12	Indrajadi, Ir	-	11.778.953,00	918.400,00
13	Sutrisno, Ir	-	2.909.878,00	136.900,00
14	Sukarman, Ir	-	11.067.840,00	723.158,00
15	Nardi Hendarto, Drs	-	30.116.293,00	2.365.700,00
16	Ecih Suhamdan, Nyonya, Dra	5.410.339.5.422	20.309.202,00	1.760.000,00
17	Ineke Setiabudiwati, Ir	-	26.201.037,00	2.338.200,00
18	T.Maruli Nadapdap, Ir	-	14.349.513,00	1.167.227,00
19	Omin Suhari, Ir	-	19.612.583,00	1.334.300,00
20	Mamat Ruchimat, Drs, BSc	-	16.979.583,00	1.067.200,00
21	Mansyur Rusmana, Drs, BSc	-	20.345.586,00	1.408.600,00
22	Anang Sumarna	-	14.952.086,00	875.400,00
23	Winarsih, Nyonya, Dra	-	15.158.647,00	1.248.200,00
24	G. Laswijianto, Ir	-	3.729.627,00	227.300,00
25	Girgijjanti, Nyonya, Dra	-	10.004.193,00	786.000,00
26	Harry Hidayat, Ir	-	17.738.167,00	1.557.800,00
27	Moch. Hasyim, Drs, Ir	-	10.953.576,00	478.200,00
28	Chusnu Yusuf, Ir	-	5.726.104,00	229.658,00
29	Diana Iskandar, Ir	-	5.596.835,00	449.700,00
30	Djoko Rusmantoro, Drs	-	1.766.916,00	122.900,00
31	Heru Suproyanto, Drs	-	5.046.420,00	170.867,00
● JUMLAH	> ..... ORANG			
- YANG MEMPUNYAI NPWP	> ..... ORANG			
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP	> ..... ORANG			
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/ THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELAMPAUI PTKP	> ..... ORANG			
C. JUMLAH A - B	> ..... ORANG			

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN PPh
PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
1995

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/ TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

• BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

A. NOMOR URUT	02
B. NAMA PEMOTONG PAJAK	PT Indah Karya (Persero)
C. NPWP PEMOTONG PAJAK	1 000 012 3 423
D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK	Jln. Ir. H Juanda No. 63, Bandung
E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT	Tubagus Haedar Ali, Ir
F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT	
G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT	Jl Inspeksi Saluran B/6, Kompl. PU Cawang, Jaktim
H. JABATAN	Komisaris
I. STATUS DAN JENIS KELAMIN	[X] KAWIN [ ] TIDAK KAWIN [X] LAKI-LAKI [ ] PEREMPUAN
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/ – TK/
K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	Januari 1995 s.d Desember 1995

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT (DALAM RUPIAH)

	• PENGHASILAN BRUTO				
1	GAJI/PENSIUN/THT	1	18.000.000,00		
2	TUNJANGAN PPh	2	1.800.000,00		
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	–		
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	–		
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	–		
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	–		
7	JUMLAH (1 S.D. 6)			7	19.800.000,00
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR			8	9.040.000,00
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)			9	28.840.000,00
	• PENGURANGAN				
10	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	–		
11	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	–		
12	IURAN PENSIUN, IURAN THT	12	–		
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)			13	28.840.000,00
	• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21				
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)			14	28.840.000,00
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA			15	–
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)			16	28.840.000,00
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)			17	–
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)			18	28.840.000,00
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN			19	3.076.000,00
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA			20	–
21	PPh PASAL 21 TERUTANG			21	3.076.000,00
22	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI			22	2.967.556,00
23	JUMLAH PPh PASAL 21	[X] a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) / [ ] b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)		23	108.444,00
24	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	[ ] a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ..... 1996 / [ ] b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN 1996		24	–

M. • [X] PEMOTONG PAJAK / [ ] KUASA

• TANDA TANGAN / NAMA TERANG

Bandung, tgl. 15 Febr. 1996

Nardi Hendarto, Drs

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN

KP PPh.3.2.3-95

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721-2

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/ PENERIMA HONORARIUM, DAN PENGHASILAN LAINNYA/ PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

1995

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT Indah Karya (Persero)

B. NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 | 0 0 0 | 0 1 2 | 3 | 4 2 3

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL			
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
4.	KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
5.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ..... ORANG			
6.	PESERTA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI DAN MANFAAT PASTI, SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
7.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK 2 ..... ORANG	54.384.000,00	54.384.000,00	3.264.000,00
	• PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL			
8.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
9.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
	• PPh PASAL 26			
11.	PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ..... ORANG	Nihil	Nihil	Nihil
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 : 2 ..... ORANG	54.384.000,00	54.384.000,00	3.264.000,00

CATATAN :

PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ..... ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2).
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3).
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).

KP.PPh.3.2.4-95

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS /DEWAN KOMISARIS /DEWAN PENGAWAS/TENAGA AHLI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

FORMULIR
1721-C

TAHUN TAKWIM
1995

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. Indah Karya (Persero) NPWP : 1 | 0 0 0 | 0 1 2 | 3 | 4 2 3

BAGIAN A : PENGURUS/DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hendro Pranoto Suselo, Ir	5.257.540.4.022	Komisaris Utama	30.420.000,00	3.313.000,00
2	Tubagus Haedar Ali, Ir	-	Komisaris	28.840.000,00	3.076.000,00
3	Kartomo Wirjobroto, Drs	5.048.636.4.027	Komisaris	27.780.000,00	2.917.000,00
4	Soeharto, Ir	5.117.845.7.016	Direktur Utama	127.802.808,00	28.102.000,00
5	Soekadarjanto, Ir	5.142.965.2.423	Direktur	118.388.679,00	25.016.800,00
6	Samuel Barbang Sutejo, Ir	5.481.062.7.011	Direktur	91.897.879,00	17.355.700,00
7	Adrian Moedjenan, Drs	5.410.340.3.424	Direktur	118.388.679,00	25.016.800,00

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JENIS KEAHLIAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP.PPh. 3.2.5-95